

# Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat<sup>1</sup>

Mahdi, Elfindri dan Yulia Anas

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Kondisi kabupaten Pasaman memperlihatkan jumlah penduduk sebanyak 244.544 tahun 2005 (BPS, Supas 2005). Sebanyak 25.978 KK masih berhak memperoleh BLT. Dan, sekitar 15,6% hasil Sensus Kemiskinan tahun 2006 ditemukan Rumah Tangga Miskin. (**Departemen Sosial, 2006:22**). Berbagai upaya yang pernah dilakukan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan sangat bervariasi menurut dinas dan SKPD, dan sesuai dengan inisiatif yang diambil oleh pemangku kepentingan di daerah.

Program-program kemiskinan, mulai dari program fisik yang terkait dengan kemiskinan, program perlindungan sosial, sampai pemberdayaan masyarakat, telah dijadikan sebagai bagian dari proses pembangunan. Sementara program perlindungan sosial lebih diinisiasi oleh pemerintah pusat, melalui program khusus nasional yang dibiayai oleh APBN. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi dampak eksternal terhadap kemiskinan dan mengurangi konsekuensi negatifnya dari kenaikan harga minyak. Misalnya program beasiswa untuk mengatasi percepatan persoalan pemerataan pendidikan, program akses kartu sehat bagi keluarga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mereka perlukan, program Raskin bagi keluarga miskin untuk memenuhi karbohidrat bersubsidi, dan program bantuan langsung tunai untuk mempertahankan agar dampak kenaikan harga BBM tidak semakin meluas dan mendalam pada keluarga miskin.

Upaya lainnya dilakukan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat miskin lebih dikembangkan dan dikelola melalui dana pemerintah daerah, seperti program sektoral dana bergulir, program penyertaan dana bantuan modal melalui BPR beserta program lainnya lintas sektoral. Misalnya melalui dinas pertanian dan perikanan dibuat program penyediaan bibit dan pelet ikan. Dan hasilnya belum diketahui apakah dapat diteruskan, atau dicari alternatif lainnya.

Untuk melengkapinya, Kabupaten Pasaman telah merintis dan mengembangkan berbagai program pengentasan kemiskinan. Baik dilakukan oleh masyarakat maupun dari program yang disusun oleh pemerintah daerah setempat. Diantaranya adalah program pembiayaan input pertanian, dana bergulir yang pendanaannya disediakan oleh pemerintah daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan usaha individu serta kelompok rumah tangga miskin.

Program dana bergulir dan subsidi input sudah dilakukan berulang kali semenjak periode pertengahan tahun 1980an. Kemudian dikembangkan dan diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai bagian dari program dinas teknis. Program tersebut kemudian dikembangkan berdasarkan dinas teknis yang akan melaksanakannya. Diantaranya adalah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Koperasi dan Perindustrian, Tenaga Kerja dan Dinas yang relevan lainnya. Sehingga tidaklah mengherankan selama ini program penanggulangan kemiskinan berupa perluasan lapangan kerja, dana bergulir, input pertanian sangat intensif dilakukan.

Program-program tersebut telah berjalan pula berulang-ulang dari tahun ke tahun dan dari suatu dinas ke dinas lainnya. Semenjak tahun 2007 tercatat cukup banyak dan bervariasi program kemiskinan (**Pemda Kab Pasaman, 2007**). Dan hingga kini belum diketahui secara terdokumentasi apakah dirasakan manfaatnya melalui program yang dimaksud, atau sebaliknya menyebabkan kelompok penerima program merasa semakin tinggi ketergantungannya terhadap program pemerintah.

---

<sup>1</sup> Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan (LPEP) Universitas Andalas dan Pemda Kabupaten Pasaman Tahun 2008

## **Tujuan**

Dengan mempedomani permasalahan penelitian, maka berikut ini tujuan penelitian adalah:

- Mendeskripsikan bagaimanakah profile dana bergulir di Pasaman.
- Menemukan bagaimana pola perkembangan dana bergulir antar karakteristik dan tempat.
- Menemukan hasil dari kegiatan dana bergulir.
- Mencari dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh penyelenggara program dan solusi ke depan.
- Merumuskan bagaimana cara memperbaiki program yang sama pada masa yang akan datang.

## **Strategi penanggulangan kemiskinan**

Tiga bentuk pendekatan yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu pendekatan perlindungan sosial, pendekatan pengembangan ekonomi masyarakat dan pendekatan penyediaan dan peningkatan infrastruktur. Pendekatan pengembangan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guna mengeluarkan kelompok masyarakat miskin dari kemiskinan. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dimaksudkan untuk menopang pelaksanaan pengembangan ekonomi dan perlindungan sosial.

Sementara itu, pendekatan perlindungan sosial dilakukan untuk individu dan rumah tangga yang berada dalam kemiskinan kronis, yaitu individu dan rumah tangga yang termiskin diantara masyarakat miskin (the poorest of the poor). Intervensi proteksi sosial merupakan tindakan pemerintah bagi mereka yang sangat rentan akan bahaya malnutrisi, penyakit akut dan resiko kematian karena kondisi mereka yang sangat rentan. Ada tiga komponen yang merupakan bagian dari proteksi sosial ini yaitu jaminan sosial, bantuan sosial dan standarisasi (Farrington and Slater, 2006). Jaminan sosial meliputi upaya untuk memberikan jaminan kepada individu dan rumahtangga yang apabila mereka menghadapi goncangan, pihak swasta maupun publik penyedia jasa dan barang yang sangat diperlukan mendapatkan jaminan dari pemerintah. Jaminan kesehatan masyarakat dalam bentuk askeskin dan kartu sehat adalah contoh yang biasa digunakan dalam memberikan jaminan sosial ini di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia. Terkadang jaminan sosial ini juga dimaksudkan untuk melindungi rumah tangga yang rentan untuk terjerumus dalam kemiskinan.

Sementara itu, bantuan sosial diberikan untuk maksud melindungi individu dan rumah tangga miskin dari ancaman malnutrisi dan resiko lainnya. Tabel 1 memaparkan bentuk-bentuk bantuan sosial dan dampak yang diharapkan. Bantuan sosial ini dapat berupa transfer sosial (cash transfer) yakni memberikan pension, bantuan kesejahteraan balita dan kupon makanan (food vouchers), bantuan makanan untuk anak sekolah dan bea-siswa bagi pendidikan dan bantuan layanan kesehatan.

Standarisasi merujuk kepada upaya untuk melindungi pekerja dari pembayaran upah rendah yang membuat pekerja tersebut terhindar dari kemiskinan akut. Akan tetapi, kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada sektor ekonomi formal. Contohnya adalah penetapan upah minimum.

Tabel 1. Bentuk bantuan sosial dan dampak yang diharapkan

<b>Tipe</b>	<b>Dampak yang diharapkan</b>	<b>Contoh</b>
Transfer tanpa syarat kepada target - tidak ada hubungan langsung dengan sektor produktif	Untuk meningkatkan dan mempertahankan konsumsi barang dan jasa disediakan oleh pemerintah maupun swasta	Tunjangan untuk orang cacat, orang tua jompo dan anak yatim piatu
Transfer bersyarat kepada target - tidak ada hubungan langsung dengan sektor produktif	Untuk meningkatkan dan mempertahankan konsumsi barang dan jasa disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Selain itu juga untuk investasi pada human capital	Kesehatan dan pendidikan anak-anak
Transfer yang terkait dengan aktivitas produktif - Target tertentu	Untuk meningkatkan dan mempertahankan konsumsi barang dan jasa disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Untuk menciptakan atau merehabilitasi sarana fisik dan lingkungan.	Proyek padat karya
Hibah	Untuk menciptakan dan merehabilitasi asset privat penerima program	Bantuan alat produksi

Secara umum, pendekatan pengembangan ekonomi masyarakat dikelompokkan atas dua bagian pula berdasarkan target pengembangan ekonomi. Target pertama adalah rumah tangga miskin yakni intervensi untuk mengembangkan usaha yang terkait langsung dengan usaha dan lapangan kerja individu dan rumahtangga miskin. Pelatihan untuk individu dari rumahtangga miskin, penyediaan kredit mikro, serta bimbingan dan pendampingan bagi pengembangan usaha kecil adalah bentuk-bentuk intervensi langsung ke rumahtangga miskin untuk mengembangkan ekonomi masyarakat miskin. Pengembangan ekonomi kedua adalah pembangunan ekonomi secara umum dengan memberikan perhatian yang besar kepada pembangunan sektor dan kawasan dimana masyarakat miskin banyak berdomisili (pro-poor development). Penyediaan infrastruktur, seperti jalan, pasar, dan air bersih, adalah salah satu bagian dari program pembangunan pro-poor tersebut. Kebijakan terakhir ini merupakan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat yang secara langsung akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha dan lapangan kerja bagi individu dan rumahtangga miskin.

Dalam kerangka inilah evaluasi program penanggulangan kemiskinan kabupaten Pasaman di lakukan, yakni mengevaluasi program perlindungan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat yang implementasinya dilakukan pada setiap SKPD. Program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Pasaman, sebagaimana terlihat dalam lampiran 4, memperlihatkan bahwa secara umum penanggulangan kemiskinan ini menggunakan ketiga pendekatan yang diuraikan diatas, yakni perlindungan sosial, pengembangan ekonomi dan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pedesaan.

### **Metodologi**

Penyusunan review Kemiskinan di Kabupaten Pasaman melalui program Pemberdayaan Masyarakat disusun berdasarkan data sekunder serta data primer yang diperlukan. Mengingat data sekunder tersedia, kemudian dilengkapi dengan data Susenas, maka terutama untuk melihat bobot masalah maka digunakan data sekunder yang dimaksud. Namun untuk melihat ke mana arah penyusunan program, maka dilengkapi dengan penyusunan data primer. Dengan demikian kedua data ini saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu dengan lainnya.

### **Data**

Data sekunder yang digunakan adalah seluruh data yang tersedia, yang nantinya berguna untuk bahan analisis. Sebelum data tersebut digunakan, terlebih dahulu dilakukan pemahaman asal usul data yang ada dan segala kemungkinan kesalahan yang perlu dihindarkan.

Mengingat Pasaman merupakan Kabupaten induk, maka data-data kemiskinan masih relatif terbatas. Untuk itu untuk tahap pertama dilakukan kompilasi data-data kemiskinan yang ada dari hasil perhitungan Susenas. Data Susenas 2006, dan data Kabupaten Pasaman Dalam angka dijadikan sebagai data awal.

Sedangkan data primer dikumpulkan dengan melibatkan beberapa kecamatan dalam sistem sampling. Sistem sampling dimulai dengan mengelompokkan atas dasar kecamatan yang ada dan implementasi kebijakan. Kemudian implementasi program di kecamatan digunakan adalah menggunakan **geographical quota sampling (GQS)**. Pemilihan ini didasari oleh peta kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasaman. Dimana perlu memperlihatkan unsur geografis dan karakter masyarakat. Karakteristik masyarakat dibagi berdasarkan satuan Tugas Dinas/SKPD yang melibatkan 5 kelompok besar sebagai berikut:

- (a) Pertanian dan hortikultura;
- (b) Perternakan dan Perkebunan;
- (c) Perdagangan dan Jasa
- (d) Industri
- (e) Lainnya.

Sample penelitian dengan mengacu kepada sistem kuota diperlukan sebanyak 120 rumah tangga miskin sasaran program kemiskinan. Pemilihan rumah tangga nantinya didasarkan dari hasil pelacakan awal melalui tahapan dari masing-masing desa dan rumah tangga terpilih. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan pilihan jumlah sample yang disusun. Jumlah ini sudah cukup merepresentasikan untuk penyusunan dokumen evaluasi kemiskinan. Mengingat yang ingin digali dari sample adalah bagaimana strategi mereka bertahan, apakah yang mereka rasakan persoalan utama, serta bagaimanakah strategi untuk mengatasinya juga didasarkan atas hasil analisis yang diberikan oleh responden.

### **Analisis**

Analisis dilakukan dengan mencoba menelusuri beberapa tahapan. Pertama adalah dengan menemukan bobot masalah kebijakan dan implementasi program kemiskinan. Perbandingan antara data sensus kemiskinan dengan estimasi kemiskinan dengan standar perhitungan pengeluaran rumah tangga. Kemudian, setelah dilakukan penemuan tentang bobot masalah, dilanjutkan dengan menelusuri analisis berdasarkan akar masalah. Analisis disesuaikan dengan keperluan dan dilakukan berdasarkan sektor dimana kemiskinan itu terlihat. Penemuan akar masalah bertujuan untuk menelusuri mana diantara pilihan program yang paling dapat memperbaiki persoalan kemiskinan.

Untuk menghasilkan kajian review kemiskinan yang memuaskan disesuaikan dengan sektor dimana program ingin dikembangkan. Usaha untuk mengintegrasikan peranan dari dinas dan SKPD, kemudian dilanjutkan dengan melihat uraian kegiatan dan keterlibatan dinas pendukung lainnya.

### **Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Pasaman**

#### **Penentuan Target Proteksi Sosial (Penentuan Individu dan Rumahtangga Miskin)**

Target individu dan rumahtangga penerima program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman adalah orang dan rumahtangga yang termasuk dalam kelompok sangat miskin, miskin dan mendekati miskin. Secara umum, ada perbedaan kriteria rumahtangga miskin menurut Dinas Kesehatan yang melaksanakan program jaminan aksekin dan jamkesmas dengan SKPD lainnya yang menggunakan kriteria dan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS). Dinas kesehatan dalam pendataannya lewat kader kesehatan yang tersebar sampai pada tingkat nagari yaitu bidan dan petugas penyuluh kesehatan.

Ukuran kemiskinan yang digunakan dalam mendata rumah tangga miskin di Kabupaten Pasaman adalah berdasarkan kriteria yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan dan non makanan. Batas kebutuhan dasar minimal diukur dari garis kemiskinan yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Terdapat tiga kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin menurut kriteria ini, sangat miskin, miskin dan mendekati miskin. Seseorang yang dikatakan sangat miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1.900 kalori/orang/hari ditambah dengan kebutuhan dasar non pangan

lainnya yang jika disetarakan dengan rupiah senilai Rp. 120.000/orang/bulan. Sementara yang tergolong miskin memperoleh pendapatan Rp 150.000/orang/bulan. Masyarakat dikategorikan mendekati miskin bila memiliki pendapatan Rp 175.000/orang/bulan.

Pengkategorian rumah tangga miskin juga menggunakan pendekatan yang sama. Dengan mengasumsikan bahwa satu rumah tangga memiliki rata-rata empat orang anggota keluarga. Rumah tangga sangat miskin bila memperoleh pendapatan Rp 480.000/bulan, kelompok miskin bila memiliki pendapatan Rp 600.000/bulan dan mendekati miskin bila pendapatannya Rp 700.000/bulan.

Berdasarkan kategori diatas, dihasilkan data rumah tangga miskin di kabupaten Pasaman pada tahun 2006 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Rumahtangga Miskin (RTM) Kabupaten Pasaman, 2006 dan Penerima Jamkesmas 2008

No	Kecamatan	Hasil PSE 2005/2006	Hasil PRM 2006					Penerima Jamkesmas 2008*
			Direktori PSE		RTM Tambahan	Total RTM	Total ARTM	
			Layak	Tidak Layak				
1	Bonjol	2,262	1,811	451	81	1,892	8,098	11,234
2	Tigo Nagari	2,236	1,316	920	113	1,429	6,348	8,115
3	Sp. Alahan Mati	817	662	155	87	749	2,855	4,743
4	Lubuk Sikaping	3,306	1,866	1,451	73	1,939	7,701	12,219
5	Dua Koto	4,717	4,144	573	29	4,173	15,543	18,732
6	Panti	3,147	2,452	695	208	2,660	10,584	13,016
7	Padang Gelugur	2,843	2,216	627	122	2,338	9,746	10,821
8	Rao	1,960	1,727	234	97	1,824	7,391	9,502
9	Mapat Tunggul	846	508	338	159	667	2,430	3,144
10	Mapat Tunggul Selatan	859	715	144	55	770	3,161	3,683
11	Rao Selatan	1,633	1,294	339	86	1,380	5,586	8,230
12	Rao Utara	1,364	1,241	123	29	1,270	5,164	7,580
<b>Kabupaten Pasaman</b>		<b>25,990</b>	<b>19,952</b>	<b>6,050</b>	<b>1,139</b>	<b>21,091</b>	<b>84,607</b>	<b>111,019</b>

Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Pasaman, 2006 dan Dinas Kesehatan, 2008

Keterangan: Data penerima Jamkesmas adalah hasil pendataan rumah tangga miskin menurut dinas Kesehatan

Namun, demikian, hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan akurasi data rumah tangga miskin ini. Penilaian masyarakat bahwa ada banyak penerima program yang semestinya tidak termasuk rumahtangga miskin. Demikian pula sebaliknya banyak rumahtangga yang masuk dalam kategori miskin tidak menerima program.

Tabel 3. Rata-rata pendapatan penerima bantuan dan kontrol

No	Jenis Kelompok Penerima Bantuan	Rata-rata pendapatan/bulan (Rp)			Rata-Rata ART	Pendapatan /kapita/bulan
		Dari pekerjaan utama	Dari pekerjaan tambahan	Total		
<b>Perlindungan Sosial</b>						
1	Beasiswa	700,000.00	0.00	700,000.00	4	175,000.00
2	BLT	385,714.29	28,571.43	414,285.71	6	69,047.62
3	BLT, Kartu Sehat	1,305,000.00	55,000.00	1,360,000.00	6	226,666.67
4	BLT, Kartu Sehat, Beasiswa	600,000.00	0.00	600,000.00	4	150,000.00
5	BLT, Kartu Sehat, Raskin	418,846.15	80,288.46	499,134.62	5	99,826.92
6	BLT, Raskin	502,777.78	69,722.22	572,500.00	5	114,500.00
7	Kartu Sehat, Raskin	533,333.33	66,666.67	600,000.00	4	150,000.00
8	Raskin	560,526.32	108,947.37	669,473.68	5	133,894.74
9	Raskin, Beasiswa	600,000.00	0.00	600,000.00	6	100,000.00
<b>Pengembangan ekonomi</b>						
1	Bantuan Modal Usaha	800,000.00	150,000.00	950,000.00	4	237,500.00
2	Bibit	450,000.00	60,000.00	510,000.00	4	127,500.00
3	Kredit Usaha Mikro	900,000.00	160,000.00	1,060,000.00	3	353,333.33
4	Simpan Pinjam	425,000.00	325,000.00	750,000.00	8	93,750.00
5	Pembiakan Sapi	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4	250,000.00

	<b>Perlindungan Sosial dan Pengembangan ekonomi</b>					
1	Bibit, Raskin	200,000.00	0.00	200,000.00	3	66,666.67
2	BLT, Raskin, Bibit	40,000.00	200,000.00	240,000.00	4	60,000.00
3	BLT, Ternak	300,000.00	0.00	300,000.00	7	42,857.14
	<b>Case</b>	<b>500,750.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>580,750.00</b>	<b>5</b>	<b>116,150.00</b>
	<b>Control</b>	<b>384,677.42</b>	<b>38,861.29</b>	<b>423,538.71</b>	<b>5</b>	<b>85,815.03</b>

### **Pengorganisasian dan Sumber Pembiayaan**

Mengingat luasnya aspek kegiatan penanggulangan kemiskinan ini, pelaksanaannya tentu tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja melainkan melibatkan semua SKPD pemerintah kabupaten. Untuk itu, pemerintah kabupaten Pasaman mengorganisasikan penanggulangan ini dalam bentuk tim koordinasi yang dinamai “Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)”. TKPK langsung dibawah tanggungjawab Bupati. Ketua pelaksana adalah kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari. Sementara itu, anggota TKPK berasal dari komponen semua SKPD .

TKPK ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Memadukan dan mempercepat langkah nyata penanggulangan kemiskinan kabupaten
- Koordinasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyerasian pelaksanaan di kabupaten
- Fasilitasi lintas pelaku, kounikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi penanggulangan kemiskinan
- Pemantauan dan penyiapan data evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di kabupaten
- Mengadakan rapat berkala.

TKPK ini juga dibentuk pada tingkat kecamatan dan tingkat nagari se kabupaten Pasaman.

Dalam in-depth interview dengan berbagai SKPD dapat disimpulkan bahwa TKPK belum dapat bekerja maksimal untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan karena empat alasan berikut:

- Setiap sektor kegiatan, SKPD, sulit berkoordinasi. Masing-masing SKPD menonjolkan kinerja organisasinya dan sulit bekerja dengan organisasi lain.
- Setiap unit mengklaim kegiatan instansinya melakukan program penanggulangan kemiskinan, namun tidak ditentukan indikator kinerja keberhasilan
- Dalam SK TKPK hanya dijelaskan tugas dan fungsi umum, namun tidak dijelaskan tugas dan fungsi setiap SKPD, beserta indikator kerjanya.

Dalam SK TKPK tidak terdapat bentuk hubungan kerja yang jelas antar institusi dalam tim dan dengan TKPK di tingkat kecamatan dan nagari.

Selain itu, penanggulangan kemiskinan ini juga dihadapkan pada persoalan pembiayaan. Sebagaimana terlihat pada lampiran 4, bahwa pembiayaan program penanggulangan kemiskinan 70% berasal dari APBN dan APBD propinsi, terutama untuk program proteksi sosial dan pengembangan infrastruktur. Besarnya ketergantungan pada APBN dan APBD propinsi membuat perencanaan dan eksekusi kegiatan di tingkat kabupaten tidak dapat dilakukan dengan baik, terutama menyangkut besarnya alokasi anggaran dan waktu pencairannya. Selain itu, tim TKPK di tingkat kabupaten dihadapkan pada ketidakpastian keberlanjutan program untuk tahun-tahun mendatang.

## Implementasi program Penanggulangan Kemiskinan pada setiap SKPD

No	Tipe Program	Nama Program	SKPD Pelaksana	Hasil Evaluasi
		Program kompensasi Pengurangan Subsidi BBM bidang pendidikan: memberikan beasiswa bagi siswa miskin untuk menutupi kebutuhan sekolah baik langsung maupun tidak langsung, termasuk iuran sekolah, buku, alat tulis, seragam dan transportasi.	Dinas Pendidikan	Hanya mampu memenuhi biaya pendidikan siswa sekitar 30%, Kuota siswa dari keluarga miskin penerima program BKM terlalu sedikit Ada penerima program BKM bukan berasal dari masyarakat miskin Beasiswa diberikan tunai, mengakibatkan pemanfaatan tidak sesuai dengan tujuannya
		Program Kesetaraan: memberantas buta huruf dan menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun		Adanya pendidikan non formal terhadap penduduk yang buta huruf memberikan dampak yang positif dalam usaha mencerdaskan masyarakat Untuk itu perlu penambahan penerima program BKM agar pendidikan tidak lagi dianggap sebagai barang mahal oleh masyarakat yang miskin
		Program Life skill: pemberian ketrampilan untuk siswa putus sekolah		lulusan program tersebut ada yang telah mampu membuat usaha sendiri, mandiri dan ada juga sebagian yang bekerja dengan orang lain Peserta program <i>life skill</i> terlalu sedikit, hanya dibatasi untuk 30 orang peserta karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada
		Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB)	memberikan pengaruh yang positif bagi murid dan bahkan memberikan semangat bagi murid untuk pergi sekolah PMT-AS dapat dilakukan pada setiap SD di masing-masing kecamatan
		Program Pembinaan dan pemberian bantuan kepada Janda Miskin		berpengaruh positif terhadap keluarga miskin pelatihan dan pembinaan yang diberikan hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan Adanya sifat ketergantungan dari masyarakat terhadap pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dan kurangnya motivasi untuk mengembangkan usaha yang telah ada.
		Program Penyuluhan bagi ibu RT dalam membangun keluarga sejahtera		Masih rendahnya kesadaran ibu – ibu rumah tangga dalam pemanfaatan pekarangan menjadi pekarangan yang bernilai ekonomis Kurangnya kesadaran keluarga dalam memanfaatkan pelayanan program KB
		Jamkesmas, Askeskin	Dinas Kesehatan	Keterlambatan penyampaian Kartu Sehat pada masyarakat miskin yang berhak Ketidaktepatan dalam penentuan sasaran penerima Kartu Sehat Kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat miskin terutama untuk daerah

No	Tipe Program	Nama Program	SKPD Pelaksana	Hasil Evaluasi
				terisolir
				Masyarakat miskin belum optimal memanfaatkan Kartu Sehat
				Peserta kadang-kadang meminta kelas yang lebih tinggi dari kelas yang ditanggung Askeskin saat rawat inap
				saat mereka sakit baru berusaha untuk mendapatkan Kartu Sehat
				rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan kurangnya sarana kesehatan
		Program Pemberdayaan Fakir miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya: dan renovasi rumah tidak layak huni	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
		Program Pembinaan panti asuhan / Panti Jompo		
		Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
		Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma		
		Program Peningkatan Kader dan Produktifitas Tenaga Kerja		
		Program Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)		sangat membantu sekali bagi masyarakat miskin, karena masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang sangat murah, dan mereka bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk pengeluaran yang lain
		peningkatan produksi peternakan, bantuan ternak kambing dan bantuan Pengembangan Usaha Budidaya (BPUB)	Dinas Perikanan dan Peternakan	dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan penerima program masih belum dapat diukur karena program yang baru diluncurkan dan kriteria dampak yang belum ditetapkan
		pengelolaan lahan dan air, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan aksi nagari pangan mandiri	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	dampak program yang dikelola dinas ini terhadap pengurangan angka kemiskinan belum dapat dilihat karena program yang terus baru berjalan dan tidak ditentukan indikator kinerja sejak semula
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan: Bantuan kredit mikro nagari	Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	
		PNPM Infrastruktur pedesaan	Dinas Pekerjaan Umum	



## Dampak yang dirasakan penerima program

Secara umum, tidak dapat dilakukan pengukuran dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ini karena program yang tengah berjalan dan ketidakjelasan indikator kinerja. Untuk itu, dalam evaluasi ini, kami melihat dampak program melalui survey pada tingkat rumah tangga penerima program menyangkut penilaian mereka terhadap tingkat kesejahteraannya setelah mendapatkan program bantuan penanggulangan kemiskinan. Tabel 4. merangkum penilaian responden tersebut.

Tabel 4. Penilaian kepada tingkat kesejahteraan setelah menerima program penanggulangan kemiskinan

No	Kesejahteraan Rumah Tangga	Ada peningkatan		Sama saja		Terjadi penurunan	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Pendapatan rumah tangga	17	14.2	76	63.3	27	22.5
2	Jenis kualitas konsumsi makanan pokok rumah tangga.	12	10.0	85	70.8	23	19.2
3	Persediaan makanan pokok/uang, atau barang untuk membeli makanan pokok	8	6.7	79	65.8	33	27.5
4	Kemampuan membeli makanan pokok di pasar terdekat	8	6.7	90	75.0	22	18.3
5	Kemampuan membeli lauk pauk	8	6.7	97	80.8	15	12.5
6	Pakaian anggota rumah tangga	13	10.8	104	86.7	3	2.5
7	Kesehatan anggota rumah tangga	7	5.8	87	72.5	26	21.7
8	Kualitas perumahan	9	7.5	106	88.3	5	4.2
9	Kualitas fasilitas transportasi yang digunakan rumah tangga	6	5.0	111	92.5	3	2.5
10	Kemampuan memenuhi kebutuhan biaya/perengkapan pendidikan (Bagi RT yang mempunyai anak sekolah)	14	11.7	74	61.7	32	26.7
11	Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha	13	10.8	90	75.0	17	14.2
12	Perkembangan tingkat kesejahteraan rumah tangga sendiri secara keseluruhan.	11	9.2	84	70.0	25	20.8

Secara umum terlihat bahwa masyarakat penerima program merasakan dan mereka tidak mengalami peningkatan kesejahteraan setelah menerima program. Sebesar 70% responden menilai bahwa tingkat kesejahteraan mereka sama saja antara sebelum dan setelah menerima program, bahkan 21% diantaranya menyatakan tingkat kesejahteraan mereka menurun. Hanya 9% responden yang merasa kesejahteraannya meningkat setelah menerima program penanggulangan kemiskinan.

Temuan ini memperlihatkan dua hal yaitu menyangkut keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan tingkat kepuasan masyarakat atas pelaksanaan program. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan menjadi sulit dikatakan berhasil berdasarkan data tersebut. Walau belum tersedia data statistik sejauh mana jumlah masyarakat yang dapat keluar dari garis kemiskinan, kita dapat memprediksi bahwa kemiskinan meningkat, setidaknya dari semakin turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesejahteraan hidup mereka.

Akan tetapi, angka ini tidak pula dapat digunakan untuk mengklaim bahwa program penanggulangan kemiskinan gagal, karena berbagai faktor dapat mempengaruhi dampak dari program penanggulangan kemiskinan. Pertama, ekonomi makro kita mendapatkan tekanan yang berat dalam setahun terakhir. Kenaikan harga BBM merupakan salah satu faktor pemicu tingginya inflasi yang menyebabkan masyarakat miskin semakin tertekan daya belinya, walau telah mendapatkan bantuan. Keadaan ini diperparah lagi oleh krisis ekonomi global yang semakin memicu peningkatan inflasi. Kedua, secara psikologis masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung menilai hidup hari ini lebih berat dari masa lalu, karena hidup masa lalu telah mereka lalui, yang sebenarnya juga berat, sehingga penilaian mereka menjadi bias. Ketiga, sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung meningkatkan tingkat konsumsinya karena

adanya bantuan menyebabkan masyarakat merasa tingkat kesejahteraannya semakin menurun, karena semakin banyak item barang konsumsi yang tidak terjangkau oleh daya beli mereka saat ini.

Berdasarkan kelompok penerima bantuan, sebagaimana terlihat dalam tabel 5, penilaian responden atas tingkat kesejahteraan mereka memperlihatkan bahwa masyarakat yang merasa mengalami peningkatan kesejahteraan justru adalah kelompok penerima program perlindungan sosial. Penerima program pengembangan ekonomi justru menilai tingkat kesejahteraan mereka tidak berubah dan bahkan ada yang merasa tingkat kesejahteraannya turun. Gambaran ini memperlihatkan bahwa program pengembangan ekonomi memerlukan perhatian serius, karena program ini justru tidak mencapai target utama yakni meningkatkan pendapatan masyarakat penerima program yang kemudian bisa menarik mereka keluar dari garis kemiskinan.

Tabel 5. Penilaian terhadap perkembangan kesejahteraan menurut kelompok penerima bantuan.

No	Jenis Kelompok Penerima Bantuan	Perkembangan tingkat kesejahteraan rumah tangga sendiri secara keseluruhan.						
		Ada peningkatan		Sama saja		Terjadi penurunan		Total
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
<b>Perlindungan Sosial</b>								
1	Basiswa	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1
2	BLT	0	0.00	7	100.00	0	0.00	7
3	BLT, Kartu Sehat	1	25.00	3	75.00	0	0.00	4
4	BLT, Kartu Sehat, Basiswa	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1
5	BLT, Kartu Sehat, Raskin	8	15.38	28	53.85	16	30.77	52
6	BLT, Raskin	1	5.56	13	72.22	4	22.22	18
7	Kartu Sehat, Raskin	0	0.00	6	100.00	0	0.00	6
8	Raskin	1	5.26	18	94.74	0	0.00	19
9	Raskin, Basiswa	0	0.00	1	50.00	1	50.00	2
<b>Pengembangan ekonomi</b>								
1	Bantuan Modal Usaha	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1
2	Bibit	0	0.00	2	100.00	0	0.00	2
3	Kredit Usaha Mikro	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1
4	Simpan Pinjam	0	0.00	1	50.00	1	50.00	2
5	Pembiakan Sapi	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1
<b>Perlindungan Sosial dan Pengembangan ekonomi</b>								
1	Bibit, Raskin	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1
2	BLT, Raskin, Bibit	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1
3	BLT, Ternak	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>9.17</b>	<b>84</b>	<b>70.00</b>	<b>25</b>	<b>20.83</b>	<b>120</b>

## Kesimpulan

Terdapat lima hal yang dapat disimpulkan dari evaluasi program penanggulangan kemiskinan ini.

- Pertama, terdapat beberapa kelemahan dalam pendataan rumah tangga miskin yang menyebabkan implementasi program menjadi bias.
- Kedua, terdapat perbedaan kriteria miskin antara dinas kesehatan dan BPS yang menyebabkan perbedaan jumlah penduduk miskin dan yang berhak menerima program penanggulangan kemiskinan antar insitusi
- Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kesulitan berkoordinasi antar SKPD. TKPK sebagai lembaga yang diharapkan dapat menjembatani kelemahan ini belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena berbagai kendala.

- Keempat, terdapat beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ditingkat lapangan.
- Kelima, walau secara detail belum dapat diukur dampak program penanggulanag bagi pengurangan angka kemiskinan di kabupaten Pasaman, namun penilaian masyarakat penerima program memperlihatkan bahwa sebagian besar diantara mereka menyatakan bahwa tidak terjadi peningkatan kesejahteraan dibandingkan dengan sebelum menerima program